

1. OPD Pelaksana: INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

Urusan yang dilaksanakan:

1. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINSTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

A. Program dan Kegiatan (Jumlah Program sebanyak 5 Program dan Kegiatan sebanyak 26 Kegiatan)

Rincian Program dan kegiatan :

NO	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG										TINGKAT CAPAIAN (%)
		ANGGARAN					REALISASI					
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7={3+4+5+6}	8	9	10	11	12={8+9+10+11}	13
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.	159.300.000	3.126.108.817	-	99.250.000	3.384.658.817	152.995.000	2.920.099.455	-	96.230.000	3.169.324.455	95,47
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	68.050.000	553.694.215	-	5.000.000	626.744.215	63.245.000	542.849.805	-	5.000.000	611.094.805	97,51
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	-	55.430.000	-	-	55.430.000	-	45.987.962	-	-	45.987.962	82,97
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	68.050.000	-	-	-	68.050.000	63.245.000	-	-	-	63.245.000	92,94
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	67.296.000	-	-	67.296.000	-	67.296.000	-	-	67.296.000	100,00
4.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	28.950.000	-	-	28.950.000	-	28.931.900	-	-	28.931.900	99,94
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	35.342.715	-	-	35.342.715	-	35.342.500	-	-	35.342.500	100,00
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	42.522.500	-	-	42.522.500	-	42.522.500	-	-	42.522.500	100,00
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	21.738.000	-	-	21.738.000	-	21.659.000	-	-	21.659.000	99,64
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	3.900.000	-	5.000.000	8.900.000	-	3.900.000	-	5.000.000	8.900.000	100,00
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	43.440.000	-	-	43.440.000	-	42.215.000	-	-	42.215.000	97,18

10.	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	-	203.875.00	-	-	203.875.000	-	203.794.943	-	-	203.794.943	99,96
11.	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	51.200.000	-	-	51.200.000	-	51.200.000	-	-	51.200.000	100,00
II.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	50.000.000	-	-	50.000.000	-	48.994.700	-	-	48.994.700	97,99
12.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	50.000.000	-	-	50.000.000	-	48.994.700	-	-	48.994.700	97,99
III	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	168.655.000	-	94.250.000	262.905.000	-	164.646.100	-	91.230.000	255.876.100	97,68
13	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	-	-	-	47.000.000	47.000.000	-	-	-	44.000.000	44.000.000	93,62
14.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	47.250.000	47.250.000	-	-	-	47.230.000	47.230.000	99,96
15.	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-	19.965.000	-	-	19.965.000	99,83
16.	Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas / Operasional	-	148.655.000	-	-	148.655.000	-	144.681.100	-	-	144.681.100	97,33
IV.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	91.250.000	2.025.270.602	-	-	2.116.520.602	89.750.000	1.911.665.000	-	-	2.001.415.000	97,20
17.	Kegiatan Pelaksanaan Internal Secara Berkala	10.800.000	986.650.502	-	-	997.450.502	10.700.000	879.135.750	-	-	889.835.750	89,21
18.	Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda.	-	512.618.000	-	-	512.618.000	-	512.517.500	-	-	512.517.500	99,98
19.	Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	5.400.000	19.370.000	-	-	24.770.000	5.400.000	18.585.000	-	-	23.985.000	96,83
20.	Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	32.900.000	37.167.700	-	-	70.067.700	31.700.000	34.205.200	-	-	65.905.200	94,06
21.	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.	-	358.912.950	-	-	358.912.950	-	357.728.600	-	-	357.728.600	99,67
22.	Kegiatan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .	14.050.000	25.995.950	-	-	40.045.950	14.050.000	25.995.950	-	-	40.045.950	100,00
23.	Kegiatan Evaluasi Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA)	28.100.000	23.983.500	-	-	52.083.500	27.900.000	23.933.500	-	-	51.833.500	99,52
24.	Evaluasi dan Sosialisasi SPIP	-	60.572.000	-	-	60.572.000	-	59.563.500	-	-	59.563.500	98,34

V.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemerintah	-	328.489.000	-	-	328.489.000	-	251.943.850	-	-	251.943.850	86,97
25.	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur .	-	293.785.000	-	-	293.785.000	-	217.239.850	-	-	217.239.850	73,95
26.	Kegiatan Khusus Aparatur Pengawasan Pada Kantor Sendiri.	-	34.704.000	-	-	34.704.000	-	34.704.000	-	-	34.704.000	100,00
	TOTAL	159.300.000	3.126.108.817	-	99.250.000	3.384.658.817	152.995.000	2.920.099.455	-	96.230.000	3.169.324.455	95,47

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan:

- Belum seimbangnya objek pemeriksaan dengan SDM yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
- Terbatasnya sarana transportasi untuk operasional lapangan.
- Rendahnya kesadaran objek pemeriksaan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
- Adanya beberapa kegiatan yang tidak terprediksi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

2. Solusi:

- Mengikutsertakan Aparatur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Diklat Fungsional.
- Mengoptimalkan pemakaian sarana transportasi yang tersedia.
- Mengintensifkan pemuthakiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan cara jemput bola dan mengaitkan kepentingan objek pemeriksaan dalam urutan naik pangkat atau pensiun (seperti : penerbitan Surat Keterangan Tidak Dalam Pemeriksaan Inspektorat) sebagai kelengkapan administrasi kepegawaian yang bersangkutan .
- Mengoptimalkan pemeriksaan sesuai dengan dukungan dana yang tersedia.

A. Hal-hal yang perlu dilaporkan:

- Dari keseluruhan capaian sasaran , dapat disimpulkan bahwa program yang direncanakan sudah tepat dan telah mengacu kepada program yang ditetapkan dalam Renstra.

DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL
INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
PER 31 DESEMBER 2017

No.	Nama/NIP	Jabatan		Kualifikasi Pendidikan terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		Nama Jabatan	Struktural	SD/SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Drs. Yespi Nawiarsih NIP. 19681017 198903 1 003	Inspektur	Eselon II b	-	-	-	V	-	V	-	-	-	-	V	-	V	V	V
2.	Emilaloviza, S.Sos.,M.M. NIP. 19670927 198903 2 001	Sekretaris	Eselon III a	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	V	V
3.	Sudarwin. S.P.M.Si NIP. 19681216 199803 1 001	Inspektur Pembantu Wilayah I	Eselon III a	-	-	-	-	V	V	-	-	-	-	V	-	-	-	V
4.	Hermawan. S.T. NIP. 1780306 200501 1 003	Inspektur Pembantu Wilayah II	Eselon III a	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	V
5.	Irzal Aziz, S.E.,M.M. NIP. 19620928 198903 1 004	Inspektur Pembantu Wilayah III	Eselon III a	-	-	-	-	V	V	-	-	-	-	V	-	-	-	V
6.	Amrizal.SE.MM NIP. 19720307 200212 1 002	Inspektur Pembantu Wilayah VI	Eselon III a	-	-	-	-	V	V	-	-	-	-	V	-	-	-	-
7.	Rio Syandra, S.S.T., S.T. NIP. 19810707 200501 1 010	Kasubag Umum & Kepegawaian	Eselon IVa	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
8.	Rahmi Yetti Idroes.S.E NIP. 19660819 199203 2 007	Kasubag Keuangan dan Perencanaan	Eselon IVa	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	V
9.	Zurwin NIP. 19620614 198703 1 002	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Eselon IVa	-	V	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
10.	Nurlaili. SH.MM NIP. 19630112 198903 2 002	Pengawas Pemerintahan Madya	Fungsional P2UPD	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	V
11.	Dra. Aprinilis Yas NIP. 19580424 198303 2 005	Pengawas Pemerintahan Madya	Fungsional P2UPD	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	V
12.	Azwir Asri.SH NIP. 19630607 198903 1 011	Auditor Madya	Fungsional Auditor	-	-	-	V	-	V	-	-	-	-	V	-	-	-	V
13.	Yefrial,S.H.,M.M. NIP. 19671028 199003 1 007	Auditor Madya	Fungsional Auditor	-	-	-	-	V	V	-	-	-	-	V	-	-	-	V
14.	Arisber. SE NIP. 19580424 198303 2 005	Pengawas Pemerintahan Madya	Fungsional P2UPD	-	-	-	V	-	V	-	-	-	-	V	-	-	-	V

No.	Nama/NIP	Jabatan		Kualifikasi Pendidikan terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		Nama Jabatan	Struktural	SD/SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
15.	Yandri, S.H., M.M. NIP. 19691107 198903 1 002	Fungsional Umum	-	-	-	-	-	V	V	-	-	-	-	V	-	-	-	V
16.	Irma Yulia ,S.Kom.M.M NIP. 19720721 199803 2 003	Auditor Kepegawaian	Fungsional Audiwan	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	V
17.	Medi Yuherman, S.H. NIP. 19700201 199303 1 005	Fungsional Umum	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	-	V	-	-	-	V
18.	Alimin NIP. 19601231 198203 1 142	Fungsional Umum	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
19.	Asnidar, R, B.Ac NIP. 19601231 198611 2 003	Pengawas Pemerintahan Muda	Fungsional P2UPD	-	-	V	-	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
20.	M. Darlis, S.Sos Nip. 19850318 201001 1 026	Pengawas Pemerintahan Muda	Fungsional P2UPD	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
21.	Eko Sutoyo, S.E NIP. 19621105 199003 1 004	Pengawas Pemerintahan Muda	Fungsional P2UPD	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
22.	Nurhayati, S.H NIP.19670910 198903 2 003	Auditor Kepegawaian Muda	Fungsional Audiwan	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	V
23.	Zulfa Hartati, S.E, M.M NIP. 19700401 199303 2 002	Pengawas Pemerintahan Muda	Fungsional P2UPD	-	-	-	-	V	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
24.	Syaftinol Martin, S.H NIP. 19621005 199301 1 002	Auditor Muda	Fungsional Auditor	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
25.	Painal, S.H NIP. 19600101 198602 1 004	Pengawas Pemerintahan Pertama	Fungsional P2UPD	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
26.	Siti Wahyu Widayat, A.Md NIP. 19700912 199303 2 001	Fungsional Umum	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
27.	Rosiana, S.ST, M.Si NIP. 19730216 200604 2 007	Auditor Muda	Fungsional Auditor	-	-	-	-	V	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
28.	Mamik Supriyati, S.E NIP. 19840415 200902 2 009	Auditor Muda	Fungsional Auditor	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
29.	Yudha Herawan, S.E. NIP. 19870711 201001 1 003	Fungsional Umum	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
30.	Rivvi Reny Midona, S.T NIP. 19800126 200801 2 001	Pengawas Pemerintahan Pertama	Fungsional P2UPD	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-

No.	Nama/NIP	Jabatan		Kualifikasi Pendidikan terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		Nama Jabatan	Struktural	SD/SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
31.	Syafridal, S.ST NIP. 19750710 200604 1 012	Pengawas Pemerintahan Pertama	Fungsional P2UPD	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
32.	Ibrahim, S.H NIP. 19741112 199802 1 001	Auditor Kepegawaian Pertama	Fungsional Audiwan	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
33.	Raflenofa Yulanda, S.E NIP.19760719 200501 1 012	Pengawas Pemerintahan Muda	Fungsional P2UPD	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
34.	Junaidi, S.E NIP.19780103 20100 1 009	Auditor Kepegawaian Pertama	Fungsional Audiwan	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
35.	Donis Prianto, S.H NIP.19761028 199802 1 001	Auditor Kepegawaian Pertama	Fungsional Audiwan	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
36.	Tri Marlisa, S.T NIP. 19850318 201001 2 026	Auditor Pertama	Fungsional Auditor	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
37.	Desrianti, S.ST NIP. 19771228 200501 2 005	Auditor Pertama	Fungsional Auditor	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
38.	Yeni Oktavera Basri, S.E NIP.19821011 201101 2 015	Auditor Pertama	Fungsional Auditor	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
39.	Andri Milda, S.E NIP.19860418 200902 2 021	Auditor Pertama	Fungsional Auditor	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
40.	Arwen Chandra, S.E NIP. 19850423 200604 1 002	Auditor Pertama	Fungsional Auditor	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
41.	Jefri Darma, S.H NIP. 19830204 200212 1 003	Fungsional Umum	-	-	-	V	-	V	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-
42.	Dian Permata Putra, S.E Nip. 19850512 200701 1 003	Fungsional Umum	-	-	-	V	-	V	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-
43.	Rostina Yusra.S.IP NIP. 19700914 200604 2 003	Fungsional Umum	-	-	-	V	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
44.	Fahrizal.S.IP NIP. 19760405 200604 1 016	Fungsional Umum	-	-	-	V	-	V	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-
45.	Syafrianto NIP. 19780426 200701 1 002	Fungsional Umum	-	-	V	-	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-	-
46.	Rio Alfino, S.Kom NIP. 19870310 201502 1 002	Fungsional Umum	-	-	-	V	-	V	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-
47.	Yenni Suryati NIP. 19620227 200012 2 001	Fungsional Umum	-	-	V	-	-	-	-	V	-	V	-	-	-	-	-	-
48.	Nova Susanti, A.Md NIP. 19761105 201101 2 003	Fungsional Umum	-	-	-	V	-	-	-	V	-	V	-	-	-	-	-	-

No.	Nama/NIP	Jabatan		Kualifikasi Pendidikan terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		Nama Jabatan	Struktural	SD/SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
49.	Endang Kos Lendra, A.Md NIP. 19820314 201212 2 001	Fungsional Umum	-	-	-	V	-	-	-	V	-	V	-	-	-	-	-	-
50.	Alpian NIP. 19750806 200212 1 002	Fungsional Umum	-	-	V	-	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-	-
	Total			-	4	4	30	11	30	20	-	5	32	13	-	1	2	15

Painan, Februari 2018

INSPEKTUR

Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003

LAMPIRAN III.1
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

Inspektorat

(1)	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	36	Opini BPK terhadap Lap. Keu. Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir	- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016, dengan opini: WTP - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017, dengan opini: WTP	Opini tahun 2016 = WTP Opini tahun 2017=WTP	Opini; 1) WTP/ <i>unqualified opinion</i>); 2) WDP/ <i>qualified opinion</i>); 3) TMP/ <i>disclaimer opinion</i>), atau 4) TIDAK WAJAR (TW/ <i>adverse opinion</i>). Opini LHP Tahun 2015, diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda
		Pengawasan Inspektorat Kabupaten	39	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2016	- Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2017 sebanyak 336 temuan , dengan rekomendasi sebanyak 839 rekomendasi. - Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2017, sebanyak 829 Rekomendasi.	98,81 %	

LAMPIRAN III.1
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

INSPEKTORAT

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Hubungan antar daerah	13	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2017	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2017, sebanyak - MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan - tentang kerjasama -. 2) MOU dengan - tentang kerjasama -. 3) Dst--	0 MOU	
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	42	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2017.	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2017	Penghargaan yang diterima, sebanyak - yang terdiri dari 1) -. 2) -. 3) -. 4) Dst.	0 Penghargaan	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KABUPATEN : Pesisir Selatan

NAMA PERANGKAT DAERAH : Inspektorat

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di Kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 0 program	0 %	-
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada SOP	Jumlah SOP Perangkat Daerah sebanyak 24 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pengurusan Surat Keluar 2. SOP ttg Pengurusan Surat Masuk 3. SOP ttg penyusunan DUK dan Bezzeting 4. SOP ttg Kenaikan Gaji Berkala 5. SOP ttg Pengajuan Cuti Pegawai 6. SOP ttg Pengajuan Surat Tugas 7. SOP ttg Pengajuan Permintaan ATK Perangkat Daerah 8. SOP ttg Pengusulan Kenaikan Pangkat 9. SOP ttg Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 10. SOP ttg Penyusunan RKA dan	Ada 24 SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis SOP Terlampir

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						DPPA 11. SOP ttg Penentrian Data Keuangan pada SIPKD 12. SOP ttg Pengajuan Permintaan GU 13. SOP ttg Penyusunan Renstra 14. SOP ttg Penyusunan LKPj dan LPPD 15. SOP ttg Penyusunan LAKIP 16. SOP ttg Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 17. SOP ttg Penyusunan Laporan Berkala Kegiatan Pengawasan 18. SOP ttg Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI 19. SOP ttg Pemeriksaan Reguler 20. SOP ttg Prosedur Pemeriksaan Khusus/Kasus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. 21. SOP ttg Pelaksanaan Tindak Lanjut 22. SOP ttg Pendistribusian Laporan Hasil Pemeriksaan 23. SOP ttg Penolakan Pemeriksaan oleh Auditi 24. SOP ttg Reviu Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN ttg SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 9 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 9	100 %	DUK tahun 2017 terlampir
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Nama jabatan fungsional antara lain : Auditor, P2UPD dan Audiwan.	Ada	Nama-Nama Jabatan Fungsional yang ada, terlampir.
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 50 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 7.172 personil	0,69 %	Mengacu pada kondisi terakhir/update Tahun 2017
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 6 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.	66,66 %	Mengacu pada kondisi terakhir/update Tahun 2017
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 9 jbt.	100 %	Mengacu pada kondisi terakhir/update tahun 2017.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA-Perangkat Daerah -DPA	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja . 3. RKA/RPKA. 4. DPA/DPPA.	4 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 program	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah tahun 2017.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp 7.651.771.129,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp1.683.578.202.919,97	0,42 %	Mengacu APBD tahun 2017 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar	1,31%	Mengacu data dari realisasi APBD Tahun 2017

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			Daerah	100%	Rp96.230.000,- - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp7.341.739.581,-		
	Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp101.705.800,- - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp2.855.099.455,-	3,56 %	Mengacu data dari realisasi APBD Tahun 2017
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp101.705.800,- - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp7.341.739.581,-	3,56 %	Mengacu data dari realisasi APBD Tahun 2017
	Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, CaLK)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, CaLK, LRA, LO,)	Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca. 2. CaLK. 3. LRA. 4. Laporan Operasional 5. Laporan Perubahan Ekuitas	Ada Ada sebanyak 5 jenis	Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca,LRA,CaLK, LO dan Laporan Perubahan Ekuitas) dan dilampirkan
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya : KIB A s.d. F	Ada	Lampiran Laporan Aset Sampai dengan Tahun 2016 dan Tahun 2017
	Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan sebesar Rp0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah sebesar Rp4.113.574.531,00	0 %	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya : - Papan Pengumuman	Jumlahnya sebanyak 1 jenis.	Papan Pengumuman informasi untuk PNS
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Surat Ketetapan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Adanya survey kepuasan tentang pelayanan Pengawasan Inspektorat.	Ada	Adanya Survey kepuasan tentang pelayanan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan,
 Penelitian dan Pengembangan dan fungsi penunjang lainnya)

1. INSPEKTORAT
2. PROGRAM DAN KEGIATAN

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	KET
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air & Listrik	
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	
4.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang2an	
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	
10.	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	
11.	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	
II.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
12.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	

III	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
13.	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	
14.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	
15.	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	
16.	Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas / Operasional	
IV.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	
17.	Kegiatan Pelaksanaan Internal Secara Berkala	
18.	Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda.	
19.	Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	
20.	Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
21.	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.	
22.	Kegiatan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .	
23.	Kegiatan Evaluasi Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA)	
24.	Evaluasi dan Sosialisasi SPIP	
V.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemerintah	
25.	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur .	
26.	Kegiatan Khusus Aparatur Pengawasan Pada Kantor Sendiri.	

3. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL.

NO.	URAIAN	JUMLAH													
		PNS										KUALIFIKASI PENDIDIKAN			
		IV b	IV a	III d	III c	III b	III a	II d	II c	II b	II a	S.2	S.1	D.III	SLTA
1	STRUKTURAL	3	1	3	2	3	4	3	1	-	-	2	11	3	4
2	FUNGSIONAL	6	3	7	2	12	-	-	-	-	-	8	21	1	-
JUMLAH		9	4	10	4	15	4	3	1	-	-	10	32	4	4

4. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA (Rp.)		
		ANGGARAN	REALISASI	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	626.744.215	611.094.805	97,50
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air & Listrik	55.430.000	45.987.962	82,97
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	68.050.000	63.245.000	92,94
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	67.296.000	67.296.000	100,00
4.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	28.950.000	28.931.900	99,94
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.342.715	35.342.500	100,00
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.522.500	42.522.500	100,00
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	21.738.000	21.659.000	99,64
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang2an	8.900.000	8.900.000	100,00
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	43.440.000	42.215.000	97,18
10.	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	203.875.000	203.794.943	99,96
11.	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	51.200.000	51.200.000	100,00

II.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	48.994.700	97,99
12.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.000.000	48.994.700	97,99
III	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	262.905.000	255.876.100	97,33
13	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	47.000.000	44.000.000	93,62
14.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	47.250.000	47.230.000	99,96
15.	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	20.000.000	19.965.000	99,83
16.	Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas / Operasional	148.655.000	144.681.100	97,33
IV.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.116.520.602	2.001.415.000	94,56
17.	Kegiatan Pelaksanaan Internal Secara Berkala	997.450.502	889.835.750	89,21
18.	Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda.	512.618.000	512.517.500	99,98
19.	Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	24.770.000	23.985.000	96,83
20.	Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	70.067.700	65.905.200	94,06

21.	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.	358.912.950	357.728.600	99,67
22.	Kegiatan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .	40.045.950	40.045.950	100,00
23.	Kegiatan Evaluasi Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA)	52.083.500	51.833.500	99,52
24.	Evaluasi dan Sosialisasi SPIP	60.572.000	59.563.500	98,34
V.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemerintah	328.489.000	251.943.850	76,70
25.	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur .	293.785.000	217.239.850	73,95
26.	Kegiatan Khusus Aparatur Pengawasan Pada Kantor Sendiri.	34.704.000	34.704.000	100,00
	TOTAL	3.384.658.817	3.169.324.455	93,64

5. KESESUAIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Visi

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Ungul, Agamis dan Sejahtera”

Misi

Misi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan adalah : “ *Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan reponsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat* “

6. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN (LENGKAP, KURANG, MENCIKUPI ATAU LAINNYA)
SARANA DAN PRASARANA YANG MENDUKUNG ANTARA LAIN :
- Bangunan Gedung Kantor:
Bangunan Gedung Kantor 2 (dua), Bangunan Tempat Ibadah 1 (satu), Bangunan Parkir 1 (satu), Pagar Gedung kantor 1 (satu).
 - Bangunan Gedung Tempat Tinggal:
Rumah Negara Golongan II Type C permanen 1 (satu) unit
 - Alat-Alat Angkutan:
Kendaraan Roda 4; 4 (empat) unit, Kendaraan Roda 2; 5 (lima) unit.
 - Alat Kantor:
Mesin Tik Manual 1 (satu) unit, Mesin Tik Elektronik 1 (satu) unit, Mesin Absensi 1 (satu) unit, Perangkat CPE 1 (satu) paket.
 - Alat Rproduksi (Penggandaan):
Alat Mesin Foto Kopi/Penggandaan 1 (satu) unit.
 - Alat Penyimpanan perlengkapan Kantor:
Lemari Besi/Metal 2 (dua) unit, Filling Besi/Metal 11 (sebelas) unit, Brangkas 1 (satu) unit.
 - Alat Kantor Lainnya:
UPS 13 (tiga belas) unit, Mesin Penghancur Kertas 1 (satu) unit, Meja Biro 3 (tiga) unit, Kursi Biro 1 (satu) unit, Generator Set 1 (satu) unit, Stabilizer 9 (lima) unit, Papan informasi 8 (delapan) unit, Merawa 1 (satu) paket.
 - Alat Rumah Tangga:
Lemari Kayu 6 (enam) unit, Rak Kayu 1 (satu) unit, Meja besi/Metal 1 (satu) unit, Meja Rapat 1 (satu) unit, Meja Resepsionis 1 (satu) unit, Kursi Rapat 6 (enam) unit, Kursi Tamu 8 (delapan) unit, Kursi Putar 8 (delapan) unit, Kursi Biasa 3 (tiga) unit, Lemari Panjang 1 (satu) unit, Kursi tunggu 6 (enam) unit, AC 11 (sebelas) unit, Kipas Angin 6 (enam) unit, Televisi 7 (tujuh) unit, Stabilisator 1 (satu) unit, Camera Video 1 (satu) unit, Gorden 2 (dua) paket, Pompa Air 1 (satu) unit

- Komputer:
Komputer 10 (sepuluh) unit, Lap Top 16 (enam belas) unit, I PAD 2 (dua) unit, Printer 12 (dua belas) unit, Scanner 2 (dua) unit, Hard Disk External 3 (tiga) unit, Server 1 (satu) unit.
- Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat:
Meja Kerja 16 (enam belas) unit, Kursi Kerja 6 (enam) unit, Kursi Rapat 1 (satu) paket, Lemari Arsip 7 (tujuh) unit.
- Alat Studio dan Alat Komunikasi:
Proyektor+Attachment 1 (satu) unit, Sound System 1 (satu) unit, Handycam 1 (satu) unit, Camera Digital 5 (lima) unit, Telepon (PABX) 1 (satu) unit, Faximile 1 (satu) unit.
- Buku Perpustakaan:
Buku Ilmu Pengetahuan Umum 160 (seratus enam puluh) buah, Buku Peraturan Perundang-undangan 261 (dua ratus enam puluh satu) buah.

Sarana dan Prasarana yang ada dilingkup Inspektorat, masih kurang memadai dan tidak layak.

7. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

I. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa masalah yang dihadapi sebagai berikut:

- a). Masih belum seimbangnya jumlah personil dengan jumlah objek pemeriksaan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan kasus/khusus.
- b). Masih rendahnya kesadaran objek pemeriksaan dalam menjalankan rekomendasi pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).
- c). Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi adanya penyimpangan (KKN).

- d). Terbatas dan kurangnya sarana transportasi untuk operasional ke lapangan.
- d). Terbatasnya sarana transportasi untuk operasional lapangan.
Adanya beberapa kegiatan yang tidak terprediksi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- e). Rendahnya kesadaran masyarakat memberikan informasi penyimpangan yang dilakukan aparat.

Strategi Pemecahan Masalah

Sejalan dengan ditemuinya berbagai permasalahan di dalam pelaksanaan kegiatan seperti yang telah dikemukakan diatas, diperlukan antisipasi dengan strategi pemecahan masalah sebagai berikut;

- a). Mengikutsertakan Aparatur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan non-Formal dan Diklat Fungsional .
- b). Mengoptimalkan pemakaian sarana transportasi yang tersedia.
- c). Menyardarkan obrik dalam pemuakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan diatasi dengan cara kerja jemput bola (penagihan langsung kepada obrik yang bersangkutan) dan mengaitkan kepentingan obrik dalam urusan naik pangkat atau pensiun (seperti: penerbitan Surat Keterangan Tidak Dalam Pemeriksaan Inspektorat) sebagai kelengkapan administrasi kepegawaian yang bersangkutan.
- d). Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, sehingga masyarakat peduli dengan kegiatan pengawasan.
- e). Mengoptimalkan pemeriksaan sesuai dengan dukungan dana yang tersedia

8. HAL LAIN YANG DIANGGAP PERLU UNTUK DILAPORKAN

- Perlunya tambahan sarana operasional dengan kondisi baik.
- Perlunya tambahan SDM yang berkompetensi.
- Perlunya tambahan kesejahteraan ASN.

Painan, Februari 2018
Inspektur
Kabupaten Pesisir Selatan,

Drs. YESPI NAWIARSIH
Pembina Tk.I.
NIP. 19681017 198903 1 003

Form 6.a

RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
(Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan,
Penelitian dan Pengembangan dan fungsi penunjang lainnya)

1. Perangkat Daerah Pelaksana
2. Program dan Kegiatan
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
7. Permasalahan dan Solusi
8. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Painan, Januari 2018
Inspektur
Kabupaten Pesisir Selatan,

Drs. YESPI NAWIARSIH
Pembina Tk.I.
NIP. 19681017 198903 1 003

KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

- A. OPD Pelaksana : INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
- B. Forum Koordinasi : -
- C. Materi Koordinasi : -
- D. Instansi Vertikal yang terlibat : -
- E. Sumber dan Jumlah Anggaran : -
- F. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan : -
- G. Hasil dan Manfaat Koordinasi : -
- H. Tindaklanjut Hasil Koordinasi : -
- I. SDM Pendukung Program dan Kegiatan:
- Jumlah Pegawai : -
 - Kualifikasi Pendidikan : -
 - Pangkat atau Golongan : -
 - Jumlah Pejabat Struktural : -



Painan, Februari 2018

INSPEKTUR

Drs. YESPI NAWIARSIH

NIP. 19681017 198903 1 003

KERJASAMA ANTAR DAERAH

A. SKPD Pelaksana : INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

B. Tabel Program dan Kegiatan :

NO.	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	NAMA BADAN KERJASAMA*	PARA PIHAK	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	DASAR HUKUM PELAKSANAAN	HASIL KERJASAMA	JANGKA WAKTU PERJANJIAN	PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH (TKKSD)	KENDALA/MASALAH
	N		I		H		I	L	

* Jika dibentuk Badan Kerjasama

Format/Kolom dapat ditambah sesuai kebutuhan.

Painan, Februari 2018

INSPEKTUR



Drs. YESPI NAWIARSIH

NIP. 19681017 198903 1 003.

KERJASAMA ANTAR DAERAH

OPD Pelaksana : INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

Bidang : -

1. Daerah yang diajak kerjasama : -

2. Dasar Hukum : -

Sebutkan dasar hukum penyelenggaraan kerjasama dengan daerah dimaksud. Nomor, tanggal dokumen perjanjian/MOU/dll.

3. Bidang Kerjasama; -

4. Nama Program dan Kegiatan :

5. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggaraan Kerjasama Antar daerah;

6. Jumlah Pegawai, kualifikasi Pendidikan, pangkat dan Golongan (Pegawai yang menangani kerjasama) : -

7. Sumber dan Jumlah Anggaran : -

8. Jangka Waktu kerjasama : -

9. Hasil (Output) dari Kerjasama : -

10. Permasalahan dan Solusi : -

11. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : -

Painan, Februari 2018

INSPEKTUR

Drs. YESPI NAWIARSIH

NIP. 19681017 198903 1 003.

KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

A. SKPD Pelaksana : INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

B. Tabel Program dan Kegiatan :

NO.	BIDANG KERJASAMA	ANGGARAN		SKPD PELAKSANA	TINGKAT CAPAIAN (%)	PROSES PERENCANAAN	KONDISI SARANA DAN PRASARANA YG DIGUNAKAN (LENGKAP/ CUKUP/ MODIFIKASI)
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)				
I.	Program.....						
1.	Kegiatan.....						
2.	Dst						
	N	I	H	I	L		
II.	Program						
1.	Kegiatan.....						
2.	Dst						
	Total						

C. Mitra yang diajak Kerjasama :

D. Dasar Hukum :

E. Bidang Kerjasama

F. Jangka Waktu :

G. Hasil (Output) dari Kerjasama :

H. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan:

- -

2. Solusi:

- -

I. SDM Pendukung Program dan Kegiatan:

- Jumlah Pegawai :
- Kualifikasi Pendidikan :
- Pangkat atau Golongan :
- Jumlah Pejabat Struktural :

PENYUSUNAN LKPj TAHUN ANGGARAN 2017

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

OPD Pelaksana : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA (Rp.)		
		ANGAGARAN	REALISASI	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	626.744.215	611.094.805	97,50
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air & Listrik	55.430.000	45.987.962	82,97
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	68.050.000	63.245.000	92,94
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	67.296.000	67.296.000	100,00
4.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	28.950.000	28.931.900	99,94
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.342.715	35.342.500	100,00
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.522.500	42.522.500	100,00
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	21.738.000	21.659.000	99,64
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang2an	8.900.000	8.900.000	100,00
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	43.440.000	42.215.000	97,18
10.	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	203.875.000	203.794.943	99,96
11.	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	51.200.000	51.200.000	100,00

II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	262.905.000	255.876.100	97,33
12.	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	47.000.000	44.000.000	93,62
13.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	47.250.000	47.230.000	99,96
14.	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	20.000.000	19.965.000	99,83
15.	Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas / Operasional	148.655.000	144.681.100	97,33
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	48.994.700	97,99
16.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.000.000	48.994.700	97,99
IV.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.116.520.602	2.001.415.000	94,56
17.	Kegiatan Pelaksanaan Internal Secara Berkala	997.450.502	889.835.750	89,21
18.	Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda.	512.618.000	512.517.500	99,98
19.	Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	24.770.000	23.985.000	96,83
20.	Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	70.067.700	65.905.200	94,06
21.	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.	358.912.950	357.728.600	99,67
22.	Kegiatan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .	40.045.950	40.045.950	100,00
23.	Kegiatan Evaluasi Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA)	52.083.500	51.833.500	99,52
24.	Evaluasi dan Sosialisasi SPIP	60.572.000	59.563.500	98,34

V.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemerintah	328.489.000	251.943.850	76,70
25.	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur .	293.785.000	217.239.850	73,95
26.	Kegiatan Khusus Aparatur Pengawasan Pada Kantor Sendiri.	34.704.000	34.704.000	100,00
TOTAL		3.384.658.817	3.169.324.455	93,64

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:

Dialokasikan dana sebesar Rp**626.744.215,00** Realisasi Rp**611.094.805,00** atau (97,51 %) dengan kegiatan sebagai berikut:

1). *Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik*

Menampung biaya belanja rekening bulanan telepon, air dan listrik dgn pagu anggaran sebesar Rp55.430.000,00 realisasi sebesar Rp45.987.962,00 (82,97 %).

2). *Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan*

Menampung biaya belanja jasa administrasi keuangan untuk satu tahun anggaran (12 bulan) dengan pagu anggaran sebesar Rp68.050.000,00 realisasi sebesar Rp63.245.000,00 (92,94%)

3). *Penyediaan jasa kebersihan kantor*

Menampung belanja Jasa kebersihan kantor dan alat kebersihan kantor serta pekarangan untuk satu tahun (12 bulan) dengan pagu anggaran sebesar Rp67.296.000,00 dengan realisasi sebesar Rp67.296.000,00 atau (100,00%).

4). *Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja*

Menampung belanja perbaikan peralatan kerja; Laptop 10 unit, Mesin Fotokopi 1 unit, Komputer 10 unit, printer13 unit AC 10 unit dan Genset 1 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp28.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp28.931.000,00 atau (99,94%).

5). *Penyediaan alat tulis kantor*

Menampung belanja keperluan alat tulis kantor untuk 1 satu) tahun anggaran (12 bulan) dengan pagu anggaran sebesar Rp35.342.715,00 dengan realisasi sebesar Rp35.342.500,00 atau (100%).

- 6). *Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.*
Menampung biaya cetak dan penggandaan kebutuhan kantor selama satu tahun (12 bulan), pagu anggaran sebesar Rp42.522.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.42.522.000,00 atau (100 %).
- 7). *Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor*
Menampung keperluan alat-alat listrik kantor selama 1 tahun (12 bulan), pagu anggaran sebesar Rp21.738.000,00 dengan realisasi sebesar Rp21.659.000,00 atau (99,64%).
- 8). *Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan*
Menampung kebutuhan media kantor (Langganan Surat Kabar Singgalang, Haluan dan Padang Ekspres) selama 1 tahun (12 bulan) dan buku-buku penunjang pengawasan pagu anggaran sebesar Rp8.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.900.000,00 atau (100,001%).
- 9). *Penyediaan makanan dan minuman*
Menampung kebutuhan makan, minum harian pegawai, rapat dan tamu kantor, pagu anggaran sebesar Rp43.440.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.42.215.000,00 atau (97,18 %).
- 10). *Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah*
Menampung belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi dalam rangka rapat koordinasi pengawasan, rapat koordinasi teknis pengawasan, pemutakhiran data pengawasan, rapat koordinasi kepegawaian, konsultasi ke Departemen Dalam Negeri, dan koordinasi pengawasan serta pelaporan ke Inspektorat Propinsi Sumatera Barat, alokasi pagu anggaran sebesar Rp203.875.000,00 dengan pelaksanaan realisasi sebesar Rp203.794.943,00 atau (99,96 %).
- 11). *Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah*
Menampung belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam monitoring dan evaluasi pengawasan serta pengiriman Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ke Obrik Pemeriksaan, alokasi pagu anggaran sebesar Rp51.200.000,00 dengan pelaksanaan realisasi sebesar Rp51.200.000,00 atau (100 %).

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dialokasikan dana sebesar Rp262.905.000,00 dengan realisasi sebesar Rp255.876.100,00 atau (97,33%) dengan kegiatan sebagai berikut;

- 1). *Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor*
Menampung belanja pengadaan perlengkapan Kantor (Bendera dan Merawa, Papan Informasi, Mesin Absensi,dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp47.000.000,00 dengan pelaksanaan realisasi sebesar Rp44.000.000,00 atau (93,62%).
- 2). *Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*
Menampung belanja pengadaan peralatan gedung kantor (1 paket Peralatan CPE, 2 unit Laptop dan 1 unit komputer PC, dengan alokasi anggaran sebesar Rp47.250.000.000,00 dengan pelaksanaan realisasi sebesar Rp47.230.000,00 (99.96%)

3). *Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor*

Menampung belanja pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor, teralis di ruangan Fungsional tertentu 1 paket, dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.000.000,00 dengan pelaksanaan realisasi sebesar Rp19.965.000,00 (100%)

4). *Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas operasional*

Menampung belanja pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional, 4 unit kendaraan roda 4 dan 5 unit kendaraan roda 2, service, suku cadang, bahan bakar minyak dan pembayaran STNK dengan alokasi anggaran sebesar Rp148.655.000,00 dengan pelaksanaan realisasi sebesar Rp144.681.100,00 (97,33%)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Dianggarkan dana sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp48.994.700,00 atau (97,99%) dengan kegiatan sebagai berikut;

1) *Pendidikan dan Pelatihan Formal*

Menampung biaya kontribusi serta perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non-formal dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dengan pelaksanaan realisasi sebesar Rp48.994.700,00 atau (97,99%)

Urusan Pilihan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Dianggarkan dana sebesar Rp2.116.520.602,00 dengan realisasi sebesar Rp2.001.415.000,00 atau (94,56%) dengan kegiatan sebagai berikut:

1). *Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala*

Menampung belanja operasional pemeriksaan berkala/reguler berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) 2017 dengan penerbitan LHP sebanyak 1.792 berkas, pagu anggaran sebesar Rp997.450.502,00 dengan realisasi sebesar Rp889.835.750,00 atau (89,21%).

2). *Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah*

Menampung biaya operasional pemeriksaan kasus/ khusus, dengan penerbitan LHP 2.934 berkas, pagu anggaran sebesar Rp512.618.000,00 dengan realisasi Rp512.517.500,00 atau (99,98%).

3). *Inventarisasi Temuan Pengawasan*

Menampung biaya operasional pelaksanaan Inventarisasi Temuan Pengawasan dan pemeliharaan Aplikasi SIM-HP dengan pagu anggaran sebesar Rp24.770.000,00 dengan realisasi sebesar Rp23.985.000,00 atau (96,83%).

4). *Tindak lanjut hasil temuan pengawasan*

Menampung biaya operasional pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan objek pemeriksaan, pagu anggaran sebesar Rp358.912.950,00 dengan

- realisasi sebesar Rp357.728.600,00 atau (99,67%).
- 5). *Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*
Menampung biaya operasional pelaksanaan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, pagu anggaran sebesar Rp70.067.700,00 dgn realisasi sebesar Rp65.905.200,00 atau (94,06%).
 - 6). *Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)*
Menampung biaya operasional pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan pagu anggaran sebesar Rp40.045.950,00 dengan realisasi sebesar Rp40.045.950,00 atau (100,00%).
 - 7). *Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD*
Menampung biaya operasional pelaksanaan Evaluasi RKA SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp52.083.500,00 dgn realisasi sebesar Rp51.833.500,00 atau (99,52 %).
 - 8). *Evaluasi dan Sosialisasi SPIP.*
Menampung biaya operasional pelaksanaan Evaluasi dan Sosialisasi SPIP dengan pagu anggaran sebesar Rp60.572.000,00 dengan realisasi sebesar Rp59.563.500,00 atau (98,34 %).

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur.

Dianggarkan dana sebesar Rp328.489.000,00 dengan realisasi sebesar Rp251.943.850,00 atau (76,70%) dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1). *Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.*
Menampung biaya pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp293.785.000,00 dengan realisasi sebesar Rp217.239.850,00 atau (73,95%) .
- 2). *Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri.*
Menampung biaya pelatihan khusus aparatur pengawasan pada kantor sendiri dengan anggaran sebesar Rp34.704.000,00 dengan realisasi sebesar Rp34.704.000 ,00 atau (100,00%) .

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

I. Permasalahan Yang Dihadapi

Pengawasan yang profesional sangat berkaitan dengan ketersediaan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan Pengawasan, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dan ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap objek pemeriksaan (obrik). Berdasarkan luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang mencapai 5.794,95 Km² yang terdiri dari 15 Kecamatan dan 182 Nagari ini sangat berpengaruh terhadap ketersediaan Sarana dan Prasarana serta Mobilitas yang ada pada Inspektorat Kabupaten Pesisir

Selatan, sudah barang tentu menghadapi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas, selama tahun 2017 ditemui beberapa masalah yang dihadapi sebagai berikut:

- a). Belum seimbangnya Objek Pemeriksaan dengan SDM yang dipunyai Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yang ada .
- b). Terbatasnya sarana transportasi untuk operasional lapangan.
- c). Rendahnya kesadaran Obrik dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
- d). Adanya beberapa kegiatan yang tidak terprediksi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan .
- e). Rendahnya kesadaran masyarakat memberikan informasi penyimpangan yang dilakukan aparat.

Strategi Pemecahan Masalah

Sejalan dengan ditemuinya berbagai permasalahan di dalam pelaksanaan kegiatan seperti yang telah dikemukakan diatas, diperlukan antisipasi dengan strategi pemecahan masalah sebagai berikut;

- a). Mengikutsertakan Aparatur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan non-Formal dan Diklat Fungsional .
- b). Mengoptimalkan pemakaian sarana transportasi yang tersedia.
- c). Menyadarkan obrik dalam pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan diatasi dengan cara kerja jemput bola (penagihan langsung kepada obrik yang bersangkutan) dan mengaitkan kepentingan obrik dalam urusan naik pangkat atau pensiun (seperti: penerbitan Surat Keterangan Tidak Dalam Pemeriksaan Inspektorat) sebagai kelengkapan administrasi kepegawaian yang bersangkutan.
- d). Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, sehingga masyarakat peduli dengan kegiatan pengawasan.
- e). Mengoptimalkan pemeriksaan sesuai dengan dukungan dana yang tersedia

Painan, Februari 2018

Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan,



Drs. YESPI NAWIARSIH

Pembina Tk.I.

NIP. 19681017 198903 1 003

DATA CAPAIAN MAKRO TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

OPD Pelaksana : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TAHUN		KET
			2016	2017	
A	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.				
	Indikator :				
1.	Terlaksananya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				
	a. Jumlah Obrik yang diperiksa secara:				
	- Reguler	Obrik	345	256	
	- Khusus	Obrik	229	459	
	- Kasus	Obrik	33	30	
	b. Jumlah temuan yang terinventarisir:				
	- Reguler	Temuan	996	1.025	
	- Khusus	Temuan	97	98	
	- Kasus	Temuan	33	30	
	c. Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti:				
	- Reguler	Temuan	668	754	
	- Khusus	Temuan	50	67	
	- Kasus	Temuan	33	30	
	d. Jumlah pelaksanaan review laporan keuangan pemerintah daerah.	Kali	1	1	
	e. Jumlah pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Kali	1	1	
	f. Jumlah pelaksanaan evaluasi rencana kerja dan anggaran OPD	Kali	2	2	
	g. Jumlah pelaksanaan review Revisi RPJMD	Kali	-	1	

2.	Terlaksananya pemeriksa dan aparatur pengawasan yang telah mengikuti pelatihan				
	a. Jumlah pemeriksa dan aparatur pengawasan yang telah mengikuti pelatihan	Orang	30	20	
	b. Jumlah aparatur pengawasan yang telah mengikuti pelatihan khusus pada kantor sendiri	Angkatan	1	2	

A. URUSAN

Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yang melakukan pengawasan maka Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah **Penunjang Urusan**.

B. INDIKATOR

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Sitiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Kategori penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (SAKIP)	CC	CC	BB	BB	A	A	A
3.	Level Maturitas SPIP	1,97	1,97	2	3	3	4	4

Painan, Februari 2018

Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan,



Drs. YESPI NAWIARSIH

Pembina Tk.I.

NIP. 19681017 198903 1 003